

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) adalah:
 - a. Permohonan kredit
 - b. Penyidikan dan analisis kredit
 - c. Keputusan atas permohonan kredit

Setiap anggota koperasi diberi pinjaman kredit maksimal masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,00. Kredit yang diberikan tidak seluruhnya berupa uang saja ataupun barang saja, melainkan campuran uang dan barang, contohnya seorang anggota meminjam kredit sebesar Rp. 10.000.000,00 , kemudian dari pihak koperasi memberikan pinjaman nominal Rp. 10.000.000,00 itu berupa 50% uang dan 50% barang. Dalam pelaksanaan pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) secara umum sudah berjalan dengan baik. Hanya saja terkadang dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit ada yang tidak sesuai dengan prosedur terbukti masih terdapat pemberian kredit ganda kepada anggota yang masih memiliki pinjaman. Tetapi

unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) terus berkembang sesuai dengan perannya dan fungsinya sebagai koperasi yang mampu mensejahterakan anggotanya.

2. Masalah yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yaitu adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Ketika anggota ingin mengajukan pinjaman kredit lagi kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung padahal anggota tersebut masih memiliki cicilan angsuran pinjaman atau kredit sebelumnya yang belum selesai dibayar. Namun dilihat dari pengalokasiannya, kredit tersebut digunakan oleh anggota untuk hal-hal yang sangat penting, seperti biaya rumah sakit, pendidikan anak dan sebagainya. Dengan adanya hal ini pihak koperasi bagian kredit menjadi dilema untuk memberikan pinjaman tersebut, karena dari segi sistemnya anggota tidak boleh menerima angsuran baru, tetapi dilihat dari segi alokasinya anggota tersebut berhak untuk mendapatkan angsuran, karena angsuran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan yang sangat penting, bukan untuk hura-hura. Hambatan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit pada unit niaga di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) dalam pemberian kredit kepada anggota sebagian sudah teratasi dengan baik oleh pengurus koperasi sehingga tidak menghambat kegiatan koperasi.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya penelitian yang dilakukan penulis pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) mengenai Prosedur Pemberian Kredit, penulis mencoba memberi saran kepada instansi / perusahaan dan saran yang disampaikan semoga dapat memberikan manfaat. Salah satu manfaat dari saran adalah untuk memberi informasi-informasi atau masukan-masukan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun saran yang disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Divisi kredit harus lebih teliti dalam pencatatan nama anggota yang meminjam kredit agar tidak ada kesalahan, termasuk kesalahan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.
2. Menyeleksi anggota yang akan meminjam kredit lebih ketat lagi, sehingga dalam mengembalikan pinjamannya nanti tidak akan menimbulkan masalah pada koperasi.